

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah direncanakan, dijalankan, diawasi, dan dievaluasi oleh administrasi publik untuk mencapai tujuan. Pemerintah pusat mengambil dari kebijakan otonomi daerah untuk mengubah sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Daerah diberi kebebasan oleh kebijakan ini untuk membentuk wilayah luas yang otonom dan bertanggung jawab. Sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka, wilayah ini dapat mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah memiliki peran dalam mengeksplorasi dan memajukan potensi dari daerah yang dijadikan sebagai sumber untuk penerimaan daerah yang tentunya akan sangat berperan dalam penentuan berhasilnya Melaksanakan kewajiban pemerintah, membangun, dan memberikan layanan kepada masyarakat di wilayah itu. Dengan adanya tanggung jawab dari para pemangku kekuasaan maka hal tersebut merupakan Salah satu pondasi yang berpengaruh dalam melakukan pengelolaan sumber daya publik yang dititipkan kepada mereka. Pertanggungjawaban ini tidak hanya berhenti pada laporan lisan, melainkan membutuhkan laporan tertulis. Penyampaian informasi mengenai keuangan adalah salah satu wujud akuntabilitas yang tertulis atas kapabilitas keuangan yang sudah dicapai

Pemerintahan dari pusat menyerahkan tugas kepada pemerintahan daerah dalam sebuah konsep yang dikenal sebagai otonomi daerah, memberikan kewenangan yang besar dalam mengurus seluruh urusan pemerintahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengorganisasian, dan juga pemanfaatan sumber daya ada, bertujuan untuk melengkapi kebutuhan lokal dan memberikan layanan masyarakat yang optimal. hal tersebut adalah pemasukan atau sumber penghasilan yang dapat dijadikan modal bagi suatu daerah menjalankan independensi daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Penghasilan dari penyaluran uang, dan Pendapatan Lainnya yang dikatakan sah.

Pemerintah daerah berusaha menggali sumber daya ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan karena mereka memiliki kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan semua potensi ekonomi daerah yang ada. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, yang ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing. Pemerintah pusat melakukan pembangunan secara menyeluruh di seluruh Indonesia, memberikan otonomi daerah.

Setiap daerah harus memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi potensi yang belum dieksplorasi dan menentukan sumber daya apa yang dapat digunakan. Salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pemerintah dan pembangunan di daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Semakin mampu daerah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, semakin bebas mereka untuk memutuskan bagaimana menggunakannya untuk memenuhi

kebutuhan, keinginan, dan prioritas pembangunan mereka. Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Daerah Lain adalah sumber Pendapatan Asli Daerah.

Jika dilihat dari otoritas tersebut, maka setiap daerah diharuskan mampu mengeksplorasi kapasitas yang sekiranya belum dimanfaatkan dan melakukan identifikasi terhadap sumber daya yang dapat diakses. Salah satu sumber penghasilan yang sangat penting untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pemerintah setempat dan membangun daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah. Besar kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula keleluasaan didalam memanfaatkan penghasilan tersebut seimbang dengan yang dibutuhkan, keinginan, dan juga pengutamaan pembangunan setempat. Sumber pendapatan Asli Daerah mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Pendapatan Daerah Sah lainnya.

Agar otonomi daerah dapat dijalankan secara meluas, nyata, dan memiliki tanggung jawab, dibutuhkan kewenangan dan kapabilitas untuk menghasilkan sumber pendanaan sendiri. Hal ini perlu adanya dukungan oleh keseimbangan dana antara pemerintah dari pusat dan pemerintahan dari daerah, dan juga diantara tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi syarat penting dalam sistem pemerintahan daerah. Dibutuhkan peran pemerintah dalam mengeksplorasi dan melakukan pengembangan terhadap kapasitas lokal sebagai sumber untuk pendapatan daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan

efisien, pemerintah melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam mengelola kepentingan pemerintahan maka pemerintah daerah diharapkan untuk menjalankan administrasinya sendiri dengan cara yang mandiri, adil, dan juga demokratis.

Sebagai langkah lanjut dari ketentuan dalam Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, terjadi beberapa perubahan dalam regulasi pelaksanaan terkait perizinan. Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan kebijakan Pemerintah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penggantian istilah tersebut dengan Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG). Perubahan ini diimplementasikan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Implementasi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) Berbasis Web (SIMBG).

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2003 mengatur tindakan yang harus diikuti mengenai regulasi yang bersifat umum, penamaan, objek, subjek, dan kelompok, metode pengukuran intensitas pemakaian layanan, prinsip dan tujuan dalam menetapkan tarif, susunan dan jumlah biaya, pengumpulan, pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan,

dan pembebasan, insentif pengumpulan, protes, pengembalian pembayaran berlebih, masa berlaku, pemeriksaan, ketentuan hukuman, penyelidikan, dan ketentuan penutup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan salah satu unit organisasi di Kota Bandung yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah terkait pelayanan perizinan terpadu yang bertujuan untuk menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayah tersebut. Berikut rincian anggaran pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Bandung:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kota
Bandung Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-------|----------------|------------------|-------|
| 1. | 2021 | 43.529.761.000 | 12.603.121.729 | 28,95 |
| 2. | 2022 | 19.578.800.000 | 12.955.927.092 | 66,38 |
| 3. | 2023 | 19.837.000.000 | 14.985.905.769 | 75,55 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Dapat kita lihat pada Tabel 1.1 menunjukkan pendapatan retribusi ditahun 2020 mengalami hasil pendapatan yang cukup bagus.lalu di tahun 2021 target pendapatan dari retribusi persetujuan bangunan gedung ditingkatkan namun Dalam pelaksanaannya, tidak berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan

yaitu di angka 28,95%. hal tersebut mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020, dan di tahun 2022 target pendapatan retribusi dikurangi supaya dapat mencapai target akan tetapi pada kenyataannya belum mencapai target yaitu di angka 66,38 %,

Data dari Informasi yang tercantum dalam tabel menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, penerimaan retribusi dari Persetujuan Bangunan Gedung memenuhi target yang sudah ditentukan. Hal ini terjadi karena pendapatan dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak dioptimalkan dengan baik. Tabel juga mencerminkan jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh DPMPTSP dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan kunjungan awal peneliti ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, terlihat penurunan pendapatan karena sebagian wajib retribusi atau masyarakat kurang sadar dalam memenuhi Tanggung jawabnya untuk membayar pelayanan atau layanan. yang telah tersedia, terutama retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Tabel 1.2

Permohonan IMB dan PBG Kota Bandung Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Jumlah | Jenis |
|----|-------|--------|-------|
| 1 | 2021 | 1.553 | IMB |
| 2 | 2022 | 1.709 | PBG |
| 3 | 2023 | 1.829 | PGB |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian,peneliti menduga optimasi pendapatan perizinan persetujuan bangunan gedung belum optimal.Hal ini diduga karena belum sesuai dengan yang pertama tujuan.tujuan merupakan hasil akhir dari suatu proses yang hendak dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan memilih dan memperhitungkan suatu tindakan yang dirasa paling tepat dari suatu sistem atau permasalahan yang dapat dipelajari yang kedua yaitu alternatif keputusan,alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan,pengambilan keputusan dihadapkan dengan beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Target yang telah ditetapkan belum tercapai pada tiga tahun terakhir karena berbagai alasan, seperti dampak pandemi, kendala teknologi, kurangnya pelatihan SDM, dan prosedur administratif yang rumit. Keputusan alternatif yang berfokus pada peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan dan pengembangan SDM, peningkatan koordinasi antar departemen, dan simplifikasi prosedur administratif dapat membantu mengatasi hambatan ini dan mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam proses perizinan akan dijamin oleh implementasi yang tepat dan pemantauan yang efektif. Yang ketiga sumber daya yang membatasi ,sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.ketersediaan sumber daya ini terbatas yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimasi. Salah satu tantangan utama dalam proses perizinan adalah kendala dan hambatan yang dihadapi pegawai saat mengunggah dokumen, serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Masalah ini dapat diselesaikan

dengan pilihan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan dan sosialisasi karyawan, penyediaan fasilitas akses teknologi, dan penyederhanaan prosedur. Baik implementasi yang tepat maupun pemantauan yang efektif akan memastikan kepuasan masyarakat serta peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem perizinan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Persetujuan Bangunan Gedung khususnya di Kota Bandung, hal tersebut akan menjadi fokus penelitian dalam menetapkan kerangka judul skripsi yaitu **“OPTIMASI PENDAPATAN PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) MELALUI METODE MATEMATIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dan data penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Bandung teridentifikasi terdapat kendala-kendala yang mempengaruhinya, seperti:

1. Belum tercapainya target yang telah ditetapkan pada 3 tahun terakhir yaitu 2020-2023
2. Adanya hambatan dan kendala dalam mengupload dokumen perizinan oleh pegawai
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ketaatan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung

C. Perumusan Masalah

1. Berdasarkan identifikasi masalah yang diteliti, maka peneliti mengetahui dan menganalisis yaitu sebagai berikut?
2. Sejauh manakah tujuan dari pendapatan perizinan persetujuan bangunan gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung?
3. Bagaimana alternatif keputusan pendapatan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung?
4. Bagaimana sumber daya yang membatasi mempengaruhi pendapatan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Tujuan pendapatan perizinan Perseetujuan Bangunan Gedung di kota Bandung.
2. Alternatif keputusan pendapatan perizinan Perseetujuan Bangunan Gedung di kota Bandung.
3. Pengaruh sumber daya yang membatasi pendapatan perizinan persetujuan bangunan gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti membagi manfaat dari penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu dalam hal teori dan penerapannya.

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan dan literatur Administrasi Publik terutama dalam analisis keuangan daerah, khususnya dalam konteks kinerja DPMPTSP Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih untuk pengembangan serta referensi keilmuan Administrasi Publik dalam hal pengkajian keuangan daerah khususnya mengenai kinerja DPMPTSP Kota Bandung.

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah.
- b. Bagi Instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah pada DPMPTSP Kota Bandung.
- c. Bagi Umum Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan masalah yang diteliti oleh peneliti.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam

F. Kerangka Berpikir

Administrasi dapat dimaknai sebagai suatu integritas dari adanya suatu proses kolaborasi secara objektif yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah dan juga para aparatur pemerintahan dalam implementasi kebijakan yang terkait dengan tujuan negara dan pemenuhan kebutuhan publik sumber daya dari personel publik diatur dan diseleraskan secara organisasi (Maksudi, 2017).

Proses merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan pemerintah dengan tujuan menyelesaikan masalah di berbagai bidang dikenal sebagai administrasi publik. Bidang keuangan adalah salah satu bidang yang mengalami masalah administrasi publik. Keuangan mencakup banyak hal, termasuk keuangan negara dan daerah. Masalah keuangan biasanya muncul selama administrasi keduanya. Untuk mengelola keuangan daerah, tahapan kebijakan harus dilakukan, salah satunya dengan membuat laporan keuangan yang baik untuk menjamin tata kelola pemerintah yang baik.

Bagaimana laporan keuangan dipresentasikan dapat menunjukkan bahwa pemerintahan daerah memiliki keuangan yang baik; keuangan pemerintah daerah tercermin dari laporan keuangan neraca, terdapat kekurangan dalam implementasi perencanaan terkait PBG di Kota Bandung. Hal ini tercermin dari penurunan dan ketidakstabilan dari jumlah sumbangan pendapatan izin Persetujuan Bangunan

Gedung dari tahun ke tahun, yang belum sesuai dengan harapan.

Penulis memutuskan untuk menggunakan teori optimasi menurut Siringorigo sebagai landasan konseptual dalam studi yang akan dilakukan mengenai cara memaksimalkan penerimaan izin Persetujuan Bangunan Gedung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Menguraikan optimalisasi sebagai suatu proses di mana solusi terbaik dicari untuk memperoleh keuntungan dan penerimaan sebesar mungkin dengan mengurangi biaya. Dalam konteks Perizinan Persetujuan Gedung, optimasi berarti mencapai keuntungan sebesar-besarnya sambil mengurangi biaya sekecil mungkin. Dengan tiga elemen yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi (Siringorigo, 2005).

Optimasi merujuk pada sistem atau upaya yang bertujuan meningkatkan kinerja suatu hal menjadi lebih baik atau mencapai tingkat tertinggi. Ini melibatkan langkah-langkah untuk memaksimalkan efisiensi dan hasil terbaik, serta menunjukkan proses di mana kegiatan-kegiatan dapat mengarah pada pencapaian hasil optimal. Optimasi juga berfokus pada pemilihan dan penerapan metode lain yang efisien dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran

